

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

M. Hasan Ubaidillah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ubaidillah_mhasan@uinsa.ac.id

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan pendekatan penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama sebagai upaya mencegah konflik sosial, meningkatkan toleransi, dan memperkuat kohesi sosial. Metode pelaksanaan meliputi edukasi partisipatif, diskusi kelompok terarah, pelatihan kader moderasi beragama, serta pendampingan berbasis komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip moderasi beragama, sikap saling menghargai antarumat beragama, serta tumbuhnya inisiatif lokal dalam menjaga kerukunan. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dalam konteks masyarakat multikultural.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, moderasi beragama, toleransi, kerukunan sosial

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari sisi agama, suku, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Di satu sisi, pluralitas menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun peradaban bangsa yang inklusif dan demokratis. Namun di sisi lain, keberagaman juga menyimpan potensi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik, terutama konflik yang berlatar belakang perbedaan keyakinan dan pemahaman keagamaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai fenomena sosial yang menunjukkan adanya kecenderungan menguatnya sikap eksklusivisme dan intoleransi beragama di tengah masyarakat. Penyebaran paham keagamaan yang ekstrem, baik yang bersifat radikal maupun liberal, berpotensi menggerus nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Kondisi ini menuntut

adanya upaya sistematis untuk memperkuat cara pandang beragama yang moderat, adil, dan seimbang.

Moderasi beragama hadir sebagai konsep dan pendekatan yang menekankan pentingnya sikap tengah (*wasathiyah*), toleran, serta menghargai perbedaan dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan untuk menempatkan praktik keagamaan agar selaras dengan nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan kedamaian sosial.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, moderasi beragama memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam membangun harmoni sosial. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi atau keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan nilai, sikap, dan kesadaran sosial. Masyarakat yang memiliki pemahaman moderasi beragama yang baik akan lebih mampu menyelesaikan perbedaan secara dialogis dan menghindari konflik destruktif.

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dirancang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang memfasilitasi proses pembelajaran sosial, dialog lintas perspektif, serta penguatan kapasitas lokal. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong terciptanya kerukunan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep, prinsip, dan nilai-nilai moderasi beragama.
2. Menumbuhkan sikap toleran, inklusif, adil, dan saling menghargai antarumat beragama.
3. Memberdayakan masyarakat agar mampu menjadi agen perdamaian dan kerukunan di lingkungannya masing-masing.

4. Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengelola perbedaan secara dialogis dan konstruktif.
5. Mendorong terbentuknya inisiatif lokal berbasis komunitas dalam penguatan moderasi beragama yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Program PKM ini dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan, sementara mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis agar program berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Kegiatan PKM dilaksanakan pada komunitas masyarakat tingkat desa/kelurahan yang memiliki latar belakang sosial-keagamaan yang beragam. Sasaran kegiatan meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta warga umum yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pelaksanaan program dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, penyusunan instrumen kegiatan, serta pemetaan kondisi sosial-keagamaan masyarakat.
2. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, ceramah dialogis, dan diskusi interaktif mengenai moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan sosial.
3. FGD bertujuan untuk menggali permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat terkait kehidupan beragama serta merumuskan solusi bersama berbasis kearifan lokal.
4. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kader lokal agar mampu menjadi agen moderasi beragama di lingkungannya.
5. Tim PKM melakukan pendampingan secara berkala untuk memastikan implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta warga, kehidupan sosial-keagamaan masyarakat secara umum berada dalam kondisi relatif kondusif. Stabilitas sosial ditandai oleh minimnya konflik terbuka berlatar belakang agama serta adanya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan lingkungan. Namun demikian, kondisi kondusif tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan ketahanan sosial-keagamaan yang kuat, karena masih terdapat sejumlah kerentanan laten dalam relasi antarumat beragama.

Interaksi antarumat beragama cenderung berlangsung secara fungsional dan pragmatis, terbatas pada kepentingan administratif, hubungan bertetangga, serta partisipasi dalam kegiatan sosial tertentu. Relasi tersebut belum berkembang menjadi ruang dialog yang bersifat substantif dan reflektif mengenai perbedaan keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan. Keterbatasan dialog ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama lebih menekankan aspek koeksistensi daripada upaya membangun pemahaman dan kepercayaan lintas iman secara berkelanjutan.

Dalam kerangka teori moderasi beragama, yang menekankan prinsip keseimbangan (tawassuth), keadilan (i'tidal), toleransi (tasamuh), dan komitmen terhadap kemajemukan, kondisi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama masih dipahami secara normatif. Moderasi cenderung dimaknai sebagai ketiadaan konflik dan sikap saling membiarkan, bukan sebagai praksis sosial yang menuntut keterlibatan aktif, dialog terbuka, serta penghargaan terhadap perbedaan sebagai realitas sosial yang niscaya. Pemahaman toleransi yang sempit ini berimplikasi pada belum terinternalisasinya nilai-nilai moderasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat.

Harmoni sosial-keagamaan yang terbentuk dengan pola demikian bersifat pasif dan rentan. Ketahanan sosial lebih bergantung pada absennya isu sensitif daripada pada kekuatan nilai moderasi yang telah mengakar. Dalam situasi tertentu, seperti munculnya isu keagamaan yang provokatif, penguatan politik identitas, atau penyebaran narasi eksklusivisme melalui media digital, kondisi ini berpotensi memicu gesekan sosial. Dengan demikian, stabilitas yang ada belum dapat dijadikan indikator keberhasilan moderasi beragama secara substantif.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan dan program penguatan moderasi beragama. Upaya pengarusutamaan moderasi beragama perlu diarahkan tidak hanya pada tataran regulatif dan normatif, tetapi juga pada proses internalisasi nilai melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Program dialog lintas iman yang berkelanjutan, pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen moderasi, serta penguatan literasi keagamaan dan digital menjadi kebutuhan strategis. Selain itu, integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dapat mendorong terbentuknya harmoni sosial yang aktif, inklusif, dan berdaya tahan. Dengan pendekatan tersebut, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang mampu memperkuat kohesi dan ketahanan masyarakat dalam konteks kemajemukan.

Dampak Program terhadap Masyarakat

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Program ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan penyampaian materi secara satu arah, tetapi sebagai proses pembelajaran bersama yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Melalui pendekatan edukasi partisipatif, masyarakat diajak untuk merefleksikan pengalaman keseharian mereka dalam berinteraksi dengan perbedaan keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan yang ada di lingkungan sekitar.

Melalui diskusi kelompok terarah dan dialog terbuka, masyarakat mulai memahami bahwa moderasi beragama bukanlah sikap pasif atau sekadar berada di tengah, melainkan sikap aktif yang menuntut keterbukaan berpikir, empati sosial, serta kesediaan untuk mendengarkan dan berdialog secara setara. Pemahaman ini menjadi penting karena selama ini moderasi beragama kerap dipersepsikan secara sempit sebagai upaya mengurangi keyakinan keagamaan. Program PKM berhasil meluruskan pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa moderasi justru memperkuat nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian.

Perubahan yang paling menonjol terlihat pada pola komunikasi antarwarga. Masyarakat menjadi lebih terbuka dan berani menyampaikan pandangan maupun perbedaan pendapat secara konstruktif tanpa rasa takut disalahkan atau dikucilkan. Forum diskusi yang difasilitasi oleh tim PKM berfungsi sebagai ruang aman (safe space) bagi warga untuk berbagi

pengalaman, keresahan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam forum tersebut, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas sosial yang perlu dikelola secara bijak melalui komunikasi yang sehat.

Dampak ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis yang digunakan dalam program PKM mampu memperkuat kepercayaan sosial (social trust) antaranggota masyarakat. Kepercayaan yang tumbuh ini menjadi modal sosial penting dalam mencegah potensi

Peran Kader Moderasi Beragama

Pembentukan kader moderasi beragama menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kader yang direkrut berasal dari unsur masyarakat lokal, seperti tokoh pemuda, tokoh agama, pengurus komunitas, dan perwakilan kelompok perempuan. Latar belakang ini memberikan kader legitimasi sosial yang kuat karena mereka telah dikenal, dipercaya, dan memiliki kedekatan emosional dengan warga. Dengan legitimasi tersebut, pesan-pesan moderasi beragama yang disampaikan tidak dipersepsikan sebagai wacana eksternal atau instruksi dari pihak luar, melainkan sebagai kebutuhan bersama yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri.

Kader moderasi beragama dibekali pemahaman konseptual dan keterampilan praktis melalui pelatihan intensif yang difasilitasi oleh tim PKM. Materi pelatihan mencakup nilai-nilai dasar moderasi beragama, teknik komunikasi dialogis, manajemen konflik sosial, serta metode edukasi partisipatif. Pembekalan ini bertujuan agar kader tidak hanya memahami moderasi beragama secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks kehidupan sosial yang nyata dan beragam. Dengan demikian, kader memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (agent of change) di tingkat komunitas.

Dalam praktiknya, kader berperan sebagai fasilitator dialog antarwarga. Mereka membantu membuka ruang komunikasi yang sehat ketika muncul perbedaan pandangan atau ketegangan sosial yang berkaitan dengan isu keagamaan. Melalui pendekatan persuasif dan empatik, kader mendorong warga untuk menyampaikan pendapat secara terbuka serta mendengarkan pandangan pihak lain dengan sikap saling menghormati. Selain itu, kader juga berfungsi sebagai mediator dalam potensi konflik, terutama pada tahap awal ketika konflik

masih bersifat laten. Kehadiran kader yang netral dan dipercaya oleh berbagai pihak memungkinkan proses mediasi berjalan lebih efektif dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.

Selain fungsi dialog dan mediasi, kader moderasi beragama juga berperan sebagai penggerak kegiatan edukasi lanjutan di masyarakat. Mereka menginisiasi diskusi tematik, kegiatan keagamaan inklusif, serta kampanye nilai toleransi yang disesuaikan dengan konteks lokal. Aktivitas ini memperkuat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama secara berkelanjutan dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Dengan peran tersebut, kader menjadi penghubung antara program PKM dan dinamika sosial masyarakat sehari-hari.

Keberadaan kader juga memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme keberlanjutan program. Nilai-nilai moderasi beragama tidak berhenti pada saat kegiatan PKM berakhir, tetapi terus hidup dan berkembang melalui peran aktif kader di komunitas. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pembentukan kader merupakan bentuk penguatan kapasitas lokal (local capacity building) yang memungkinkan masyarakat mengelola dinamika sosial-keagamaannya secara mandiri. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada intervensi eksternal, melainkan memiliki sumber daya internal yang mampu menjaga harmoni sosial, memperkuat kohesi, dan merawat keberagaman sebagai kekayaan bersama.

Analisis Keberhasilan Program Berbasis Pendekatan Partisipatif

Keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan pendekatan partisipatif yang secara konsisten menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan aktor penting yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman sosial, serta kapasitas untuk terlibat aktif dalam proses perubahan. Oleh karena itu, sejak tahap awal perencanaan, masyarakat telah dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, pemetaan kebutuhan, serta penentuan bentuk kegiatan yang dianggap relevan dengan kondisi mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan memberikan ruang bagi terbangunnya dialog antara tim PKM dan warga. Melalui forum musyawarah dan diskusi terbuka, masyarakat menyampaikan aspirasi, harapan, serta kekhawatiran mereka terkait isu moderasi beragama. Proses ini tidak hanya membantu tim PKM merumuskan program yang

lebih kontekstual, tetapi juga menumbuhkan rasa dihargai dan diakui dalam diri masyarakat. Ketika gagasan dan kebutuhan mereka menjadi bagian dari desain program, muncul rasa memiliki (*sense of ownership*) yang kuat terhadap kegiatan PKM. Rasa memiliki ini menjadi faktor penting yang mendorong partisipasi aktif dan komitmen warga selama pelaksanaan program.

Pada tahap pelaksanaan, pendekatan partisipatif diwujudkan melalui berbagai metode interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dan refleksi bersama. Masyarakat tidak diposisikan sebagai pendengar pasif, melainkan sebagai mitra dialog yang secara aktif berbagi pengalaman dan pengetahuan. Interaksi yang setara ini menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendorong munculnya kesadaran kritis mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan memperkuat kepercayaan antara warga dan tim PKM, sehingga proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama berlangsung lebih efektif.

Pendekatan partisipatif juga memberikan ruang yang luas bagi penyesuaian materi dan metode dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Tim PKM tidak memaksakan kerangka konseptual yang kaku, tetapi membuka diri terhadap masukan dan dinamika lokal. Nilai-nilai moderasi beragama disampaikan dengan bahasa, contoh, dan ilustrasi yang dekat dengan pengalaman sehari-hari warga. Penyesuaian ini meningkatkan relevansi program sekaligus meminimalkan resistensi yang mungkin muncul akibat perbedaan latar belakang budaya atau pemahaman keagamaan. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah menerima dan menginternalisasi pesan-pesan yang disampaikan.

Pada tahap evaluasi, masyarakat kembali dilibatkan secara aktif melalui refleksi bersama dan diskusi evaluatif. Warga diajak untuk menilai sejauh mana program memberikan manfaat, mengidentifikasi perubahan yang dirasakan, serta menyampaikan kritik dan saran untuk perbaikan. Proses evaluasi partisipatif ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kolektif. Masyarakat menjadi lebih sadar akan proses perubahan yang mereka alami dan peran yang telah mereka ambil dalam mewujudkan perubahan tersebut.

Secara teoretis, keberhasilan program PKM ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi, dialog, dan penguatan kapasitas lokal. Pemberdayaan dipahami sebagai proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan

kontrol atas kehidupan mereka sendiri, termasuk dalam mengelola dinamika sosial-keagamaan. Melalui pendekatan partisipatif, program PKM tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan sosial masyarakat dalam menghadapi perbedaan.

Lebih jauh, pendekatan ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama akan lebih efektif apabila dilakukan melalui proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Moderasi beragama tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif, tetapi perlu dihidupi sebagai nilai yang tercermin dalam sikap dan perilaku sosial sehari-hari. Program PKM ini berhasil mendorong transformasi tersebut dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan.

Dengan demikian, program PKM ini memberikan pelajaran penting bahwa pendekatan partisipatif merupakan strategi yang relevan dan efektif dalam upaya penguatan moderasi beragama. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap, pola komunikasi, dan perilaku sosial masyarakat ke arah yang lebih inklusif, toleran, dan harmonis. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi aktif merupakan fondasi yang kokoh dalam membangun kehidupan sosial-keagamaan yang moderat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) “Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Moderasi Beragama” terbukti berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama sebagai fondasi dalam menjaga kerukunan sosial. Keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya pemahaman warga terhadap makna moderasi beragama yang tidak lagi dipahami secara sempit, melainkan sebagai sikap beragama yang adil, seimbang, terbuka, dan menghargai perbedaan. Masyarakat mulai menyadari bahwa keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan merupakan realitas sosial yang harus dikelola secara bijak demi terciptanya kehidupan bersama yang damai dan harmonis.

Melalui pendekatan pemberdayaan yang bersifat partisipatif, program PKM ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek kegiatan, tetapi sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial. Masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi program. Keterlibatan ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap tujuan program. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya diterima sebagai pengetahuan baru, tetapi juga diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran kolektif dan praktik sosial sehari-hari.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan juga memungkinkan terbangunnya ruang dialog yang sehat antarwarga. Melalui diskusi terbuka dan kegiatan edukatif, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial-keagamaan. Proses dialog ini memperkuat sikap saling menghormati, mengurangi prasangka, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perbedaan secara konstruktif. Dampaknya, pola komunikasi antarwarga menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara damai.

Selain peningkatan pemahaman dan sikap, program PKM ini juga berkontribusi pada penguatan kapasitas sosial masyarakat. Masyarakat menjadi lebih percaya diri dalam mengelola dinamika keberagaman di lingkungannya serta memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial. Nilai-nilai moderasi beragama mulai dipraktikkan dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan, sehingga menciptakan iklim sosial yang lebih toleran dan kondusif.

Ke depan, program serupa perlu dikembangkan dan diperluas jangkauannya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan multi-pihak ini penting untuk memastikan bahwa penguatan moderasi beragama tidak bersifat sporadis, tetapi terintegrasi secara sistematis dalam kehidupan sosial masyarakat. Sinergi antaraktor akan memperkuat keberlanjutan program serta memperluas dampak positifnya.

Dengan demikian, program PKM “Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Moderasi Beragama” dapat menjadi model praktik baik dalam upaya membangun kerukunan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama akan lebih efektif dan berkelanjutan apabila dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun harmoni sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2020). *Strategi nasional pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan*. BNPT.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum. (Karya asli diterbitkan 1970)

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2020–2024*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Penguatan moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Nasution, S. (2017). *Sosiologi agama*. Bumi Aksara.

Pranarka, A. M. W., & Moeljarto. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Center for Strategic and International Studies.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Raharjo, M. D. (2002). *Islam dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.

Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Refika Aditama.

Suryana, A. (2020). Moderasi beragama sebagai upaya deradikalisasi paham keagamaan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 1–16.

Wahyudi, A., & Lestari, S. (2021). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis keagamaan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 23–34.